

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Ilmiah

Adrian Sutedi. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta: Sinar Grafika.
2012

Andrian Sutedi. Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai
Permasalahannya. Jakarta : Sinar Grafika. 2016

Bintoro Tjokromidjojo, Teori Strategi Pembangunan Nasional. Jakarta: P.T.
Gunung Agung. 2000

Burhan Ashshofa. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 2001

Djajasudarma, Fatimah. Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan
Kajian. Bandung: PT Refika Aditama. 2006

Engstorm, Anne et. al. Implementation of Public *E-procurement* in Swedish
Government Entities. Proceedings of the International Multiconference on
Computer Science and Information Technology. 2009.

Muindro Renyowijoyo. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Jakarta:
Mitra Wacana Media. 2008

Ronny Hanitjo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta:
Ghalia Indonesia. 1990

Sadjijono. Memahami Beberapa Bab pokok Hukum Administrasi. Yogyakarta:
Laksbang Pressindo. 2008

- Salim HS dan Hrlies Septian Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007
- Santoso Satroepoetro. Pelaksanaan Latihan. Jakarta: Gramedia. 1982
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Sondang P. Siagian. Filsafat Administrasi. Jakarta: PT Gunung Agung. 1985
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2017
- Suteki and Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik). Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2020
- The Liang Gie, dan Sutarto. Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi. Yogyakarta: Karya Kencana. 1997
- W Gulo. Metode Penelitian. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia. 2002
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. "Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik." *Journal of Governance and Social Policy* 1, no.1 (2020): 24-34.
- Susanto, S.N.H. "Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 205-217.

Wibawa, K. C. S. "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no.2 (2019): 218-234.

Widanti, N. P. T. "Model Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Di Bali." (2020): 29-52

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri. Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah. Jakarta: BPP Nasional. 2002.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia Modul 1. Jakarta : LKPP. 2010

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta aturan-aturan perubahannya

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering

Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17/KA/02/2012

Website :

<https://dash.dataipse.com/>

<https://lpse.jatengprov.go.id/>

<https://jdih.lkpp.go.id/>

<https://setda.jatengprov.go.id/>

<https://jdih.jatengprov.go.id/>

<https://inaproc.id/>

<https://eproc.lkpp.go.id/>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat riset Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suryo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 79916201 Fax (024) 79916206
Laman: www.fh.undip.ac.id, E-mail: fh@ve.undip.ac.id

Nomor : 678 /UN7.F1/AK/IF/2024
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/ Penelitian

27 FEB 2024

Yth. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pahlawan No.9 Gedung D Lt.1 & 4 Semarang
Semarang

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian dilingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Muhammad Jundi As Salim
NIM : 11000120130459
alamat : Jl. Tirta Usodo Timur III No. 30B, Pedalangan, Kec. Banyumanik,
Kota Semarang
nomor HP : 087700310736
bidang minat : Hukum Administrasi Negara
judul skripsi : Pelaksanaan Sistem *E-procurement* Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Tengah sebagai Implementasi Konsep *Good governance*

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP 196711191993032002

Lampiran 2: Instrumen Penelitian

LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

NO	Fokus Penelitian	Tujuan	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Subjek Penelitian
1	Pelaksanaan sistem <i>e-procurement</i> melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Tengah.	Untuk mengidentifikasi dan analisis terhadap pelaksanaan sistem <i>e-procurement</i> melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Tengah	Prosedur Pelaksanaan <i>e-procurement</i>	Metode <i>E-Tendering</i>	- Apakah yang dimaksud dengan <i>e-tendering</i> menurut Biro APBJ? - Bagaimana Prosedur pelaksanaan <i>procurement</i> dengan metode <i>e-tendering</i> melalui LPSE Provinsi Jawa Tengah?	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa/ Bagian Sistem Informasi Pengadaan
				Metode <i>E-Purchasing</i>	- Apakah yang dimaksud dengan <i>e-purchasing</i> menurut Biro APBJ? - Bagaimana Prosedur pelaksanaan <i>procurement</i> dengan metode <i>e-purchasing</i> melalui LPSE Provinsi Jawa Tengah?	Barang dan Jasa/ Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
			Tantangan, Hambatan, dan Potensi	- Apakah terdapat tantangan dan hambatan dalam melaksanakan <i>procurement</i> melalui LPSE Provinsi Jawa Tengah? - Bagaimana Biro APBJ dan LPSE Provinsi Jawa Tengah menyikapi tantangan dan hambatan yang terjadi?	Bagian Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa/ Layanan Pengadaan Secara	

					- Adakah potensi yang dimiliki <i>e-procurement</i> dibandingkan dengan <i>manual procurement</i> ?	Elektronik (LPSE)
2.	Implementasi konsep <i>good governance</i> dalam sistem <i>e-procurement</i> melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Tengah	Untuk mengidentifikasi dan analisis terhadap implementasi konsep <i>good governance</i> dalam sistem <i>e-procurement</i> melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Tengah.	<i>Good Governance</i> dalam Pelaksanaan <i>e-procurement</i>	Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Efektif dan Efisien	- Bagaimana mempertahankan Akuntabilitas dalam melaksanakan <i>e-procurement</i> melalui LPSE Provinsi Jawa Tengah? - Bagaimana Transparansi yang dilakukan dalam pelaksanaan <i>e-procurement</i> melalui LPSE Provinsi Jawa Tengah? - Bagaimana partisipasi yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan <i>e-procurement</i> melalui LPSE Provinsi Jawa Tengah? Baik partisipasi untuk masyarakat, pemerintah maupun swasta (perusahaan) - Bagaimana menjaga efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan <i>e-procurement</i> melalui LPSE Provinsi Jawa Tengah? (dibandingkan dengan <i>manual Procurement</i>)	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa/ Bagian Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa/ Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

**Lampiran 3: Surat Balasan riset Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
SETDA Provinsi Jawa Tengah**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 071/299
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

Semarang, 08 Maret 2024
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
di -
Semarang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 678/UN7.F1/AK/II/2024 pada tanggal 27 Februari 2024 perihal permohonan riset/penelitian sebagai bahan penyusunan skripsi mahasiswa atas nama Muhammad Jundi As Salim dengan judul, "Pelaksanaan Sistem *E-Procurement* melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Tengah sebagai Implementasi Konsep *Good Governance*".

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami;
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik;
3. Waktu pengambilan data disesuaikan dengan kebutuhan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik, disampaikan terima kasih.

**Pih. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa



Ditandatangani secara elektronik oleh:

RUSLI SOFIAN MURWANTO, S.Kom., M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP 19680328 199703 1 002



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



LEMBAR DISPOSISI
Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Agenda Surat	Disposisi
Nomor : 240 / TU-APBJ / 2024	
Tanggal diterima : 28/02/2024	
Dari : Universitas Diponegoro	
Nomor/Tgl Surat : 678/UN7.F1/AK/II/2024 27 Februari 2024	
Diteruskan Kepada	
<p>1. Ka. Bag. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ka. Sub. Bag. Pengkajian dan Standarisasi PBJb. Ka. Sub. Bag. Perencanaan PBJc. Ka. Sub. Bag. Pelaksanaan PBJ	<p>- Fardif = U</p> <p>4/3 24</p>
<p>2. Ka. Bag. Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ka. Sub. Bag. Pengelolaan Sistem Informasi PBJb. Ka. Sub. Bag. Pengelolaan LPSE	
<p>3. Ka. Bag. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ka. Sub. Bag. Pembinaan SDM dan Kelembagaan PBJb. Ka. Sub. Bag. Advokasi PBJc. Ka. Sub. Bag. Tata Usaha Biro	
CATATAN :	